

RENJA 2025



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nya lah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Tahun 2024 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

Semarang, Maret 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang



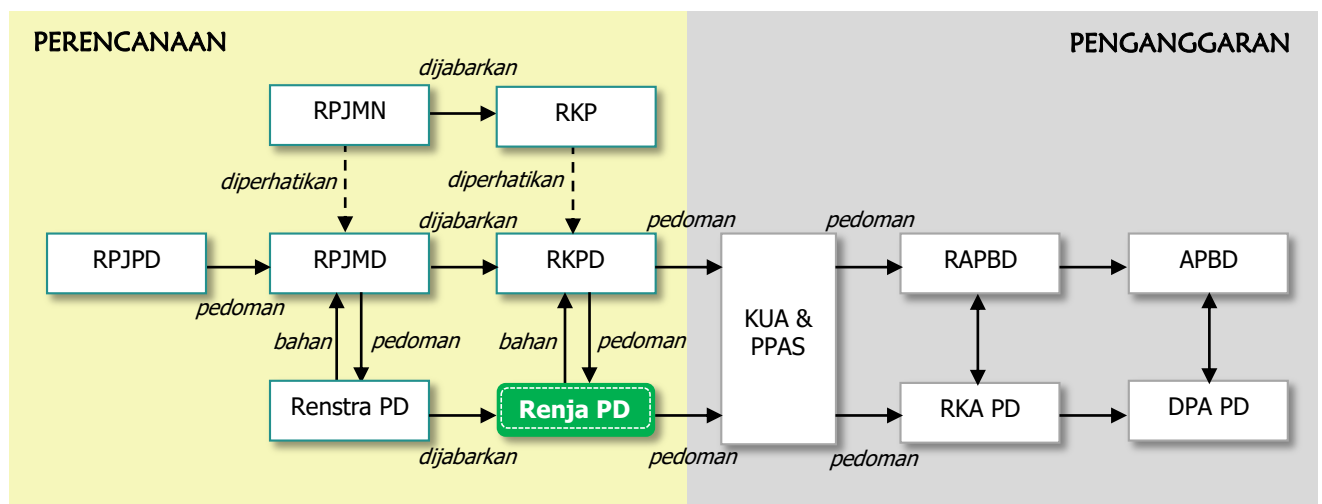
Drs. Ufi Imran Basuki, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja, yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra. Untuk penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selain itu, dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Nomor B/35/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian yang dituangkan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, maka kemudian sub kegiatan juga termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah harus diimplementasikan dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

- o. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- p. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
- u. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- v. Peraturan Walikota Semarang, Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;

- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 43);
- y. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Nomor B/35/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, review terhadap Rancangan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta inovasi yang dikembangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023. Juga diperlukan perkiraan capaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2024, yang menggunakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023
Dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100	27 Dokumen	81 Dokumen	300
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100	6 Dokumen	10 Dokumen	250
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	200
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 Laporan	N/A	6 Laporan	6 Laporan	100	6 Laporan	12 Laporan	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	200
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/Bulan	N/A	41 Orang/Bulan	50 Orang / Bulan	121.95	50 Orang/ Bulan	100 Orang / Bulan	222,22
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	4 Laporan	200
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	N/A	14 Laporan	14 Laporan	100	14 Laporan	28 Laporan	200
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	3 Dokumen	300	1 Dokumen	3 Dokumen	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang	N/A	400 Orang	509 Orang	127,25	480 Orang	989 Orang	247,25
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100	100	300%	300
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	2 Paket	200
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	N/A	1 Paket	1 Paket	100	2 Paket	3 Paket	300
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	N/A	3 Paket	5 Paket	166,67	2 Paket	7 Paket	233,33
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	N/A	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	8 Paket	200
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	N/A	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	6 paket	200
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	200
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	N/A	20 Laporan	23 Laporan	115	20 Laporan	43 Laporan	215
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	N/A	5 Dokumen	6 Dokumen	120	3 Dokumen	9 Dokumen	180
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	N/A	2 Unit	5 Unit	250	5 Unit	10 Unit	333,33
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	N/A	1 Unit	4 Unit	400	5 Unit	9 Unit	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	N/A	5 Unit	7 Unit	140	1 Unit	8 Unit	133,33
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	N/A	36 Laporan	36 Laporan	100	36 Laporan	72 Laporan	200
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	N/A	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	24 Laporan	200
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	200
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	N/A	27 Unit	30 Unit	111,11	30 Unit	60 Unit	200
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	N/A	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	200 Unit	200
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	N/A	1 Unit	2 Unit	200	2 Unit	4 Unit	200
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	N/A	10 Unit	10 Unit	100	2 Unit	12 Unit	120
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93 Program/kegiatan	93 Program / kegiatan	93 Program/ kegiatan	101 Program / kegiatan	108,60	96 Program / kegiatan	290 Program / kegiatan	311,82
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	150
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	N/A	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	100	4 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	113,33
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	N/A	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	106.67	46 Perangkat Daerah	78 Perangkat Daerah	260
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	5 Dokumen	7 Dokumen	350

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	N/A	25 Organisasi	29 Organisasi	116	25 Organisasi	54 Organisasi	216
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga	32 Lembaga	30 Lembaga	31 Lembaga	103.33	31 Lembaga	94 Lembaga	313,33
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	N/A	25 Lembaga	29 Lembaga	116	25 Lembaga	54 Lembaga	216
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60 Orang	N/A	50 Orang	200 Orang	400	200 Orang	400 Orang	666,66
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	3 Dokumen	300	7 Dokumen	10 Dokumen	1000
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10.04 point	25,69 point	14,24 Point	25,08 point	179,14	12,84 Point	63,61 Point	633,56
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	200	N/A	12 Dokumen	300
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	9 Dokumen	450	12 Dokumen	21 Dokumen	1050

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	N/A	30 Perangkat Daerah	35 Perangkat Daerah	116.67	60 Perangkat Daerah	95 Perangkat Daerah	271,42
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Orang	N/A	100 Orang	227 Orang	227	100 Orang	327 Orang	363,33
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	N/A	12 Dokumen	12 Dokumen	100	2 Dokumen	14 Dokumen	116,66
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1770 Orang	N/A	1630 Orang	1770 Orang	108.59	297 Orang	2067 Orang	116,78
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 Orang	N/A	3 Orang	13 Orang	433.33	5 Orang	18 Orang	600

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	24 Dokumen	600	19 Dokumen	43 Dokumen	1075
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Perangkat Daerah	N/A	16 Perangkat Daerah	16 Perangkat Daerah	100	4 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	125
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	12 Dokumen	1200	30 Dokumen	42 Dokumen	4200
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	12 Dokumen	1200	1 Dokumen	13 Dokumen	1300
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	N/A	1 Lembaga	1 Lembaga	100	3 Lembaga	4 Lembaga	400

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	175 Orang	N/A	150 Orang	354 Orang	263	16 Orang	370 Orang	211,42
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	12 Dokumen	600	1 Dokumen	13 Dokumen	650
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	N/A	2 Layanan	2 Layanan	100	1 Layanan	3 Layanan	150
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	6 Kegiatan	300
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	200
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	5 Dokumen	250
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	10 Jejaring	8 Jejaring	8 Jejaring	8 Jejaring	100	9 Jejaring	25 Jejaring	250
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 Organisasi	6 Organisasi	7 Organisasi	7 Organisasi	100	3 Organisasi	10 Organisasi	142,85
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	8 Dokumen	400	6 Dokumen	14 Dokumen	700
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	7 Lembaga	100	9 Lembaga	22 Lembaga	314,28
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	N/A	400 Orang	650 Orang	162,5	50 Orang	700 Orang	175
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	10 Dokumen	250	3 Dokumen	13 Dokumen	325
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	N/A	4 Dokumen	4 Dokumen	100	6 Dokumen	10 Dokumen	250
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia	6 Dokumen	N/A	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6 Dokumen	12 Dokumen	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,010	0,028	0,012	0,027	225	N/A	0,055	550
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Perangkat Daerah	N/A	30 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	106,67	N/A	32 Perangkat Daerah	91,43
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	N/A	60 Orang	170 Orang	283,33	N/A	170 Orang	242,85
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	2 Dokumen	100
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	2 Dokumen	100
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan	Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	3 Dokumen	150	N/A	3 Dokumen	150
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	2 Dokumen	100
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100	N/A	200%	200
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	200
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	150
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100	100%	300%	300
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	177 Kelurahan	100	177 Kelurahan	531 Kelurahan	300

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan & Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	4 Dokumen	200
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	N/A	1 Lembaga	1 Lembaga	100	1 Lembaga	2 Lembaga	200
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	N/A	2 Laporan	2 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	150
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	N/A	2 Laporan	3 Laporan	150	4 Laporan	7 Laporan	175

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2024

Dari data sebagaimana tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2023, DP3A Kota Semarang melaksanakan 2 Urusan, 9 program, 24 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan. Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A (%)	100%	100%	100	100%
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A (%)	100%	100%	100	100%
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)	100%	100%	100	100%

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan (%)	100%	100%	100	100%

3) Program Perlindungan Perempuan

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	14,24	25,08	176,12	25,46

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi (%)	100%	100%	100	100%

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator kinerja *outcome* pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak (%)	100%	100%	100	100%

6) Program Pemenuhan Hak Anak

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan pemenuhan hak anak	100%	100%	100	100%

7) Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,027%	225	0,028%

8) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Persentase Kelurahan yang Menerapkan Sistem Informasi	100%	100%	100	100%

9) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator kinerja outcome pada program ini adalah :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023			REALISASI 2022
	TARGET	REALISASI	%	
Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100	100%

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Perubahan DP3A Kota Semarang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan DP3A Kota Semarang Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang Tahun 2023

NO	KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG			22.076.630.822	20.323.095.766	92,06%
I	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.814.492.709	10.230.135.069	94,60%
A	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.469.600	7.841.460	92,58%
1	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.911.040	1.873.800	98,05%
2	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.507.200	980.280	65,04%
3	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.590.480	1.585.920	99,71%
4	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	602.880	602.800	99,99%
5	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	883.600	874.000	98,91%
6	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.382.080	1.332.500	96,41%
7	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	592.320	592.160	99,97%
B	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.237.908.757	7.827.134.961	95,01%
8	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.992.027.837	7.593.455.281	95,01%
9	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.149.080	230.998.660	95,00%
10	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	493.600	493.400	99,96%
11	2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	560.000	520.800	93,00%
12	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.382.080	1.370.860	99,19%
13	2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	296.160	295.960	99,93%
C	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	407.978.598	389.880.750	95,56%
14	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	157.978.598	149.196.900	94,44%
15	2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	240.683.850	96,27%
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	850.805.009	788.636.682	92,69%
16	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.050	4.518.800	90,45%

17	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.634.060	16.502.000	99,21%
18	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	19.006.991	63,36%
19	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.867.328	57.350.100	91,22%
20	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.515.430	12.466.316	60,77%
21	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	31.542.825	78,86%
22	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	332.704.731	313.370.650	94,19%
23	2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	343.087.410	333.879.000	97,32%
D	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.759.461	442.426.968	96,02%
24	2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	177.295.840	173.420.000	97,81%
25	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.151.721	113.538.478	94,50%
26	2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	163.311.900	155.468.490	95,20%
E	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311.425.200	302.231.081	97,05%
27	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.219.200	100.631.923	94,74%
28	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.206.000	201.599.158	98,24%
F	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.146.084	471.983.167	87,87%
29	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.344.500	44.215.393	99,71%
30	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.294.699	296.788.924	82,15%
31	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.817.900	32.431.580	98,82%
32	2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.252.665	94.188.270	99,93%
33	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.436.320	4.359.000	98,26%
II	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.188.188.288	1.103.859.260	92,90%
G	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	156.706.250	147.706.031	94,26%
34	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	70.031.250	65.304.900	93,25%

35	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500.000	17.330.300	99,03%
36	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	56.900.000	54.049.831	94,99%
37	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	12.275.000	11.021.000	89,78%
H	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.961.720	93.598.531	93,63%
38	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5.473.950	4.900.000	89,51%
39	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	94.487.770	88.698.531	93,87%
I	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	931.520.318	862.554.698	92,60%
40	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	450.335.139	420.630.475	93,40%
41	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	376.828.979	342.694.642	90,94%
42	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	104.356.200	99.229.581	95,09%
III	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.190.227.619	1.704.809.670	77,84%
J	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	406.373.170	340.723.730	83,85%
43	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	279.601.424	237.375.730	84,90%
44	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	126.771.746	103.348.000	81,52%

K	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.284.602.330	1.013.374.370	78,89%
45	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.284.602.330	1.013.374.370	78,89%
L	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	499.252.119	350.711.570	70,25%
47	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.493.199	50.004.430	49,27%
48	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	156.060.590	93.246.250	59,75%
49	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25.199.500	19.536.390	77,53%
50	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	216.498.830	187.924.500	86,80%
IV	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.885.339.165	1.709.495.752	90,67%
M	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.995.000	118.053.250	95,21%
51	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	103.995.000	101.203.250	97,32%
52	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	7.860.000	78,60%
53	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	8.990.000	89,90%

N	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.688.594.165	1.526.003.502	90,37%
54	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.067.928.350	955.831.621	89,50%
55	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000	476.967.631	90,85%
56	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95.665.815	93.204.250	97,43%
O	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.750.000	65.439.000	89,95%
57	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.750.000	65.439.000	89,95%
V	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	318.495.190	307.375.000	96,51%
P	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	318.495.190	307.375.000	96,51%
58	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	82.683.220	78.415.000	94,84%
59	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	235.811.970	228.960.000	97,09%
VI	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	3.466.273.136	3.304.637.648	95,34%
Q	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	173.040.950	144.198.850	83,33%
60	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan	23.000.000	17.115.000	74,41%

		Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
61	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.040.950	127.083.850	84,70%
R	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3.293.232.186	3.160.438.798	95,97%
62	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.585.152.637	1.505.571.048	94,98%
63	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.725.230	76.212.000	84,94%
64	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.575.776.439	1.548.228.750	98,25%
65	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.577.880	30.427.000	71,46%
VII	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	432.208.570	366.455.065	84,79%
S	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	47.308.430	36.850.000	77,89%
66	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47.308.430	36.850.000	77,89%
T	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.417.010	106.323.750	86,15%
68	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.417.740	33.954.000	84,01%
70	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	60.572.750	53.202.250	87,83%

71	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	22.426.520	19.167.500	85,47%
U	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	261.483.130	223.281.315	85,39%
72	2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.873.030	110.178.915	88,23%
74	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136.610.100	113.102.400	82,79%
VIII	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	78.056.220	70.708.500	90,59%
V	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	78.056.220	70.708.500	90,59%
75	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	40.245.700	33.542.000	83,34%
76	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	37.810.520	37.166.500	98,30%
IX	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.703.349.925	1.525.619.802	89,57%
W	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.703.349.925	1.525.619.802	89,57%
77	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	402.671.740	384.234.580	95,42%

78	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	96.895.300	84.898.331	87,62%
79	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	69.244.010	61.403.320	88,68%
80	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.134.538.875	995.083.571	87,71%
T o t a l			22.076.630.822	20.323.095.766	92,06%

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 Urusan, 9 program, 24 Kegiatan dan 76 Sub Kegiatan pada DP3A Kota Semarang sebesar Rp.22.076.630.822,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.20.323.095.766.- atau sebesar 92,06%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.753.535.056,- atau sebesar 7,94%. Sisa anggaran tersebut antara lain disebabkan hal - hal sebagai berikut :

- Sisa lebih anggaran dari beberapa komponen belanja dikarenakan harga di pasaran dibawah dari SSH yang ada di DPA;
- Efisiensi kegiatan pertemuan dengan masyarakat yang semula halfday/ fullday menjadi berlokasi di aset milik Pemerintah Kota Semarang;
- Sisa lebih anggaran uang transport peserta yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi;
- Efisiensi beberapa kegiatan/ acara yang semula luring menjadi daring.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan DP3A Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi sebagai dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Terkait penyelenggaraan pelayanan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, telah diraih beberapa penghargaan, diantaranya yaitu :

1. Kota Semarang berhasil meningkatkan Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang semula mendapatkan predikat Nindya menjadi Predikat Utama;
2. Kota Semarang berhasil meningkatkan Kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 yang semula mendapatkan predikat Utama menjadi Predikat Mentor;
3. Kota Semarang mendapatkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) Tahun 2023 karena capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), hasil evaluasi Kota Layak Anak (KLA) dan hasil evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam kesetaraan Gender;
4. DP3A mendampingi pemberian penghargaan unit yang telah mengikuti proses standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) yaitu SMP N 21, SMP N 1, SMP N 2, SMP N 36, SMP N 33, SMP N 39, dan SMP IT PAPB Kota Semarang Pemenang Terbaik I Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022 dari Kementerian PPN/Bappenas, dan Juara III Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 atas Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Tingkat Kota dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas.

Selain terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga diraih penghargaan terkait urusan pemberdayaan masyarakat, diantaranya yaitu :

1. DP3A mendampingi Kelurahan Pedalangan pada Lomba Pelaksana Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sehingga mendapatkan Juara II;
2. DP3A melakukan pembinaan kepada Kelurahan Gedawang dalam rangka penilaian Evaluasi Perkembangan Kelurahan/Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga meraih Juara Harapan I kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan DP3A Kota Semarang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026, yang kemudian mengalami beberapa perubahan sebagaimana tercantum pada IKU DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026. Analisis

ini diantaranya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Bappeda sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang
Sampai Dengan Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Tujuan :											
1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	70,59	71,80	66,34	68,10
2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	N/A	90%	91%	92%	93%	94%	92,46%	100%	100%	100%
Sasaran :											
1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	N/A	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,30	49,78	51,29	51,32
	Persentase kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	N/A	28,24 %	42,37 %	56,49 %	84,74 %	100%	33,89%	42,37%	56.49%	84,74%
	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	N/A	701	801	801	801	901	744,4	833,01	801	801
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	N/A	70.10	70.40	70.70	71.00	71.30	76,71	78,75	70.70	71.00

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA / IKU						REALISASI		PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”** memiliki 2 indikator kinerja yaitu “Persentase implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan” dan “Indeks Perlindungan Anak (IPA)”.

Pada tahun 2023, realisasi indikator Persentase implemementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan realisasi indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah 71,80 dari target sebesar 64,58 (capaian 111,17%).

Adapun untuk Tujuan **“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan”. Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 100% dari target sebesar 91% (capaian 109,89%).

- b. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) **“Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga”**, dengan 4 indikator yaitu :

- a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;

Pada tahun 2023, realisasi indikator ini berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

- b. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;

Pada tahun 2023, realisasi indikator ini adalah sebesar 51,30 dari target sebesar 51,27 (capaian 100,05%).

- Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut.

[illegible]

2	Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Selain dari aspek Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga Kota Semarang, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Anak sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak
serta Perlindungan Anak Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,64	14,24	12,84	11,44	10,04	25,46	25,08	12,84	11,44
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,012%	0,011%	0,011%	0,010	0,028%	0,027%	0,011%	0,011 %

Dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, indikator tersebut di atas juga merupakan indikator capaian yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Disamping hal-hal tersebut di atas, realisasi kinerja pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel-tabel berikut

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya, selain realisasi dari target pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait langsung dengan fungsinya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga perlu dicermati realisasi dari indikator kinerja daerah yang bersifat makro, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Sampai Dengan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	TARGET RENSTRA					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR										
Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak										
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7,00%	7,65%	7,80%	7,95%	8,10%	59,38%	48,90%	75%	100%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,012%	0,012%	0,011%	0,011%	0,010%	0,028%	0,027%	0,011%	0,011%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	15,64	14,24	12,84	11,44	10,04	25,46	25,08	12,84	11,44

4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,69	74,69	74,71	74,71	74,73	73,64	73,93	74,71	74,71
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72	64,58	66,34	68,1	69,87	70,59	71,80	66,34	68,1
7	Persentase LPM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DP3A, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DP3A Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2023 adalah sebesar 48,90% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah ARG Kota Semarang}}{\text{Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal Kota Semarang}} \times 100\% \\
 &= \frac{2.402.843.118.914 \text{ (sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024)}}{4.913.981.568.912 \text{ (sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024)}} \times 100\% \\
 &= \mathbf{48,90\%}
 \end{aligned}$$

Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2022 dikarenakan metode perhitungan berbeda mengikuti Pedoman Umum Penyusunan LPPD tahun 2023 dari Kemendagri. Jika di tahun 2022 pembagi ARG adalah Belanja Langsung APBD sedangkan di tahun 2023 pembagi ARG adalah Belanja Operasi dan Belanja Modal.

2. Capaian indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2023 adalah sebesar 0,027% dengan perhitungan sebagai berikut

$$\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani}}{\text{Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 th)}} \times 100\% \quad (\text{DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020})$$
$$= \frac{123}{443.967} \times 100\% \quad (\text{sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023})$$
$$= 0,027\% \quad (\text{sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2023})$$

Hal ini menurun sebesar 0,001% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 0,028%. Dengan penurunan tersebut semua anak korban kekerasan pada tahun 2023 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik.

3. Capaian indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO juga mengalami penurunan di tahun 2023 ini dengan jumlah sebesar 25,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000 \quad (\text{DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020})$$
$$= \frac{214}{856.530} \times 100.000 \quad (\text{sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023})$$
$$= 24,98 \quad (\text{sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2023})$$

Hal ini menurun sebesar 0,48 dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 25,46. Dengan penurunan tersebut semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota Semarang dan capaian indikator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 73,93. Angka tersebut merupakan capaian IDG Kota Semarang Tahun 2022. Nilai IDG Kota Semarang tahun 2023 akan dirilis oleh BPS sekitar bulan Juni 2024. Hal ini meningkat 0,29 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,64.
5. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebesar 71,80. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang Tahun 2022. Nilai IPA Kota Semarang tahun 2023 akan dirilis oleh KemenPPPA dan BPS sekitar bulan November 2024. Hal ini meningkat 1,21 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,59.
6. Capaian indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2023 adalah terealisasi sebesar 0,025% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
& \frac{\text{Jumlah kasus KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\% \\
&= \frac{114 \text{ (sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023)}}{454.134 \text{ (sumber : disdaldukkb, 2023)}} \times 100\% \\
&= \mathbf{0,025\%}
\end{aligned}$$

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan kasus korban KDRT (0,025%) dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (0,025%). Namun demikian kasus KDRT pada tahun 2023 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang dengan baik (100%).

7. Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya :

1. Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan.
Hal ini antara lain disebabkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mendorong komitmen kepala daerah untuk meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan perempuan.
2. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga.
Hal ini antara lain disebabkan belum maksimalnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pentingnya Kualitas Ketahanan Keluarga.
Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang antara lain meminta dukungan penuh dari stakeholder terkait peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

Sedangkan untuk permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya :

1. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.
Hal ini antara lain disebabkan kapasitas SDM dalam peningkatan pelayanan dan system informasi kepada masyarakat masih belum optimal.
Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang antara lain dukungan Stakeholder untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DP3A Kota Semarang, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- 3) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 4) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- 5) Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif.

b. Peluang

- 1) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- 2) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
- 3) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;

- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang partisipatif kepada LPMD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitasi penyusunan data profil kelurahan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DP3A Kota Semarang sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
2. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
4. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
5. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalan Potensi SDA dan Penerapan TTG;
7. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
8. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
9. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

RKPD Kota Semarang Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RKP Tahun 2025, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, serta Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang. Terkait RPJMD, tahun 20245 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD.

Adapun rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025 adalah **“Keberlanjutan capaian pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkesinambungan”** dengan lima prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Percepatan penyediaan **infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan;
- Prioritas Daerah 3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, penurunan **kemiskinan** serta penghapusan **kemiskinan ekstrem**;
- Prioritas Daerah 4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif;
- Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2025 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut :

1. Percepatan **penyediaan infrastruktur** yang berkualitas, adaptif dan ramah lingkungan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup, dengan fokus pada:
 - a. Penanganan genangan banjir dan rob
 - b. Penyediaan dan Peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah, terutama pada kawasan *Central Business District* (CBD), kawasan pendidikan, serta peningkatan jembatan penghubung wilayah.
 - c. Penataan kawasan strategis perkotaan
 - d. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
 - e. Penanganan kawasan kumuh
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan bencana
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas.
2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas **ekonomi** yang tangguh dan berkeadilan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan jasa, antara lain melalui pembangunan dan peningkatan pasar-pasar;

- b. Pembangunan sarana pengembangan Usaha Mikro.
 - c. Pembangunan dan peningkatan sarana wisata berbasis potensi lokal.
 - d. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.
 - e. Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular.
3. Percepatan pengurangan **pengangguran**, penurunan **kemiskinan** serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada:
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, melalui intervensi langsung sasaran berbasis data terpadu
 - b. Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
 - c. Peningkatan kualifikasi calon pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
 - d. Peningkatan sarana perlindungan sosial.
4. Peningkatan kualitas dan kapasitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul dan produktif, dengan fokus pada:
- a. peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, dan berkualitas melalui pembangunan puskesmas beserta sarana dan prasarannya
 - b. Peningkatan penyediaan sarana pendidikan yang layak dan berkualitas, terutama untuk penyediaan ruang kelas SD dan SMP.
5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang dinamis, efektif dan akuntabel, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan,
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya
 - c. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara
 - d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,30%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 84,80
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,74 – 3,84%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,80 – 7,10%

Terkait prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, sesuai tugas dan fungsinya, DP3A Kota Semarang mendukung pencapaian prioritas ketiga, yaitu **“Percepatan pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem”**.

Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja OPD Tahun 2025, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Review terhadap Rancangan RKPD Kota Semarang Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		11.041.386.000	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		11.041.386.000	
		Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A				Kota Semarang	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A			
		Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				Kota Semarang	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan		8.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan		8.000.000	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.000.000	
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.000.000	
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 Laporan	2.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								Realisasi Kinerja SKPD			
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.000.000	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan		9.428.792.867	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan		9.428.792.867	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	9.175.892.867	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	9.175.892.867	
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250.000.000	
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2 Laporan	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	700.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Keuangan Akhir Tahun SKPD		dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	700.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	700.000	
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur		60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur		60.000.000	
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	10.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	10.000.000	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan		707.293.133	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan pelaksanaan		707.293.133	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			administrasi umum					administrasi umum			
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.000.000	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Semarang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.293.133	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Semarang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.293.133	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Semarang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	30.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								yang Disediakan			
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Semarang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	300.000.000	
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	200.000.000	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Semarang	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
						Pemerintah Daerah					
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	400.000.000	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Semarang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Semarang	Persentase tersedianya	100%	375.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Semarang	Persentase tersedianya	100%	375.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Pemerintahan Daerah		kebutuhan jasa kantor			Pemerintahan Daerah		kebutuhan jasa kantor			
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	125.000.000	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Semarang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	412.300.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	412.300.000	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	238.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	1 Unit	238.800.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	90.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Semarang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	90.000.000	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	40.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	40.000.000	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Semarang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000	
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 Unit	18.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Kota Semarang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	2 Unit	18.500.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Semarang	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	1.365.000.000	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Semarang	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	1.365.000.000	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	270.000.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah program/ kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	270.000.000	
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	120.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	120.000.000	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang	46 Perangkat Daerah	50.000.000	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang	46 Perangkat Daerah	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			PUG termasuk PPRG		Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	170.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	170.000.000	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5 Dokumen	50.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	5 Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	120.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Organisasi	120.000.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	925.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	925.000.000	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia	25 Lembaga	500.000.000	Advokasi Kebijakan dan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga	25 Lembaga	500.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	350.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	200 Orang	350.000.000	
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	75.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	75.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Kota Semarang	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44%	3.360.978.000	Program Perlindungan Perempuan	Kota Semarang	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44%	3.360.978.000	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 kegiatan	260.978.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 kegiatan	260.978.000	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	150.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	110.978.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	110.978.000	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	5 Lembaga	2.200.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	5 Lembaga	2.200.000.000	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	100 Orang	2.100.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kota Semarang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	100 Orang	2.100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Layanan Pengaduan			Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan Pengaduan			
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	900.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang terstandardisasi	26 Lembaga	900.000.000	
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	250.000.000	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia	297 Orang	250.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Kota Semarang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia	297 Orang	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota		Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota		Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	200.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5 Orang	200.000.000	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	19 Dokumen	200.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	19 Dokumen	200.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kota Semarang	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	2.230.000.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kota Semarang	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	2.230.000.000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	30.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	30.000.000	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	4 Perangkat Daerah	10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	4 Perangkat Daerah	10.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	10.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	10.000.000	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	17 Kegiatan	2.050.000.000	Penguatan dan Pengembangan	Kota Semarang	Fasilitasi penguatan	17 Kegiatan	2.050.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Kesejahteraan Keluarga			Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	1.000.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	1.000.000.000	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat	16 Orang	800.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Kota Semarang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang	16 Orang	800.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	150.000.000	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	150.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	150.000.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	150.000.000	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	265.000.000	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kota Semarang	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	265.000.000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	265.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat	Kota Semarang	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	265.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
						Daerah Kabupaten/Kota					
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	145.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	145.000.000	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	120.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	120.000.000	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Kota Semarang	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	495.000.000	Program Pemenuhan Hak Anak	Kota Semarang	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	495.000.000	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Kota Semarang	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	250.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Kota Semarang	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	150.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	150.000.000	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	100.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	245.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	245.000.000	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	45.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	3 Dokumen	45.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
								Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	350.000.000	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	350.000.000	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	350.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kota Semarang	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	350.000.000	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	1 Dokumen	250.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	1 Dokumen	250.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
			Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Lomba Desa dan Kelurahan		Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	1.080.000.000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	1.080.000.000	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	1.080.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	1.080.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	300.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	300.000.000	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	1 Lembaga	130.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Kota Semarang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	1 Lembaga	130.000.000	

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6						
	dan Masyarakat Hukum Adat		Ditingkatkan Kapasitasnya			dan Masyarakat Hukum Adat		Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	200.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	200.000.000	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	450.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Semarang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	450.000.000	
TOTAL					20.187.364.000	TOTAL				20.187.364.000	

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun sebelumnya, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota.

Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangar berbagai aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kota Semarang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang beserta tanggapannya telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

III.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 – 2024 yang tertuang pada RPJMN tahun 2020-2024, dalam mendukung visi nasional “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotongroyong”, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi Presiden;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kemen PPPA yang merupakan dokumen perencanaan tahunan kementerian dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Selain perumusan diatas juga terdapat Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri yaitu melalui Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri yaitu **“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.”**

Tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa;
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun seiring terbitnya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Kota Semarang Nomor B/35/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian, baik terkait indikator sasaran DP3A Kota Semarang maupun definisi dan formulasi perhitungan indikator tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 yaitu :

**“Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan
Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak”,
dan
“Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pembangunan”**

dengan indikator tujuan sebagai berikut:

- a. Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan
- b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- c. Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga
Dengan indikator sasaran yaitu :
 - a. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan
 - b. Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan
 - c. Jumlah kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga
 - d. Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
Dengan indikator sasaran yaitu : Peringkat Kota Layak Anak (KLA)
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah
Dengan indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang
Dengan indikator sasaran yaitu Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)

Selanjutnya dalam penerapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025, mengacu pada target yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Semarang Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	TARGET
1	2	3		4		5	6
1	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak			1	Persentase impelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100
				2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	68,1
		1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	1	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100
				2	Prosentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,32
				3	Persentase Kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	%	56,49

				4	Prosentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100
		2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak		Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	801
		3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah		Nilai SAKIP	Point	71
2	Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	93
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang		Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	100

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SEMARANG

IV. I PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dimana RKPD Tahun 2025 mengacu pada RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah; serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
2. Mempedomani Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, dimana kemudian dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih Tahun 2021-2026. Secara umum DP3A Kota Semarang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Namun secara khusus, DP3A Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian misi pertama, yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial” dan pencapaian misi ketiga, yaitu “Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan”;
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan, baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;

5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu – isu strategis DP3A Kota Semarang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program / kegiatan.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah urusan yang akan dilaksanakan DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 Urusan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 8 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dan 7 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang;
3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 21 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 14 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang;
4. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan DP3A Kota Semarang pada tahun 2025 adalah sebanyak 74 sub kegiatan, yang terdiri dari 34 sub kegiatan penunjang, dan 40 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang;
5. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.20.187.364.000,-** yang bersumber dari dana APBD Kota Semarang.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						Kota Semarang				
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A		11.041.386.000	Kota Semarang	APBD		100%	12.681.742.000
		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A			Kota Semarang			100%	
		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Kota Semarang			100%	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Jumlah dokumen dan laporan		Jumlah dokumen dan laporan		8.000.000	Kota Semarang	APBD		27 dokumen	10.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan		perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan							
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.000.000	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	1.000.000
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	1.500.000
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	1.500.000
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	1.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	1.500.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Dokumen DPA-SKPD							
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	1.500.000
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	2.000.000	Kota Semarang	APBD		6 Laporan	2.000.000
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	1.000.000	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	1.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah							
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan		Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan		9.428.792.867	Kota Semarang	APBD		100%	9.893.587.511
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	9.175.892.867	Kota Semarang	APBD		50 Orang/Bulan	9.634.687.511
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	250.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	256.000.000
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	700.000	Kota Semarang	APBD		2 Laporan	700.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	700.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	700.000
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	1.000.000	Kota Semarang	APBD		14 Laporan	1.000.000
2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	500.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	500.000
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian	Cakupan peningkatan Pelayanan		Cakupan peningkatan Pelayanan		60.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	60.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Perangkat Daerah	sumber daya aparatur		sumber daya aparatur							
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	480 Orang	10.000.000	Kota Semarang	APBD		480 Orang	10.000.000
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum		Cakupan pelaksanaan administrasi umum		707.293.133	Kota Semarang	APBD		100%	1.284.854.489
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Paket	40.000.000
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Paket	10.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Paket	15.000.000
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.293.133	Kota Semarang	APBD		4 Paket	99.854.489
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Paket	30.000.000
2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	70.000.000	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	140.000.000
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	300.000.000	Kota Semarang	APBD		20 Laporan	750.000.000
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan	3 Dokumen	200.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	200.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		50.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	638.000.000
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan dinas jabatan			Kota Semarang	APBD			250.000.000
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	400.000.000	Kota Semarang	APBD		10 Unit	300.000.000
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	10.000.000	Kota Semarang	APBD		5 Unit	23.000.000
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	20.000.000	Kota Semarang	APBD		5 Unit	45.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
				yang Disediakan							
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Unit	20.000.000
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor		Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor		375.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	385.000.000
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	125.000.000	Kota Semarang	APBD		36 Laporan	125.000.000
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	Kota Semarang	APBD		12 Laporan	260.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan aset dinas		Persentase pemeliharaan aset dinas		412.300.000	Kota Semarang	APBD		100%	410.300.000
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	238.800.000	Kota Semarang	APBD		1 Unit	238.800.000
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	90.000.000	Kota Semarang	APBD		30 Unit	90.000.000
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	40.000.000	Kota Semarang	APBD		10 Unit	40.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Unit	25.000.000
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	18.500.000	Kota Semarang	APBD		2 Unit	16.500.000
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	1.365.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	2.825.000.000
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui	98 Program	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	98 Program	270.000.000	Kota Semarang	APBD		102 Program	995.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		analisis gender									
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	300.000.000
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	375.000.000
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan	4 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan	4 Perangkat Daerah	120.000.000	Kota Semarang	APBD		4 Perangkat Daerah	150.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Perangkat Daerah	50.000.000	Kota Semarang	APBD		46 Perangkat Daerah	170.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	3 Organisasi	170.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Organisasi	330.000.000
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		5 Dokumen	180.000.000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan	25 Organisasi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	25 Organisasi	120.000.000	Kota Semarang	APBD		25 Organisasi	150.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	31 Lembaga	925.000.000	Kota Semarang	APBD		32 Lembaga	1.500.000.000
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 Lembaga	500.000.000	Kota Semarang	APBD		25 Lembaga	700.000.000
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	200 Orang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	200 Orang	350.000.000	Kota Semarang	APBD		200 Orang	350.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas							
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7 Dokumen	75.000.000	Kota Semarang	APBD		7 Dokumen	75.000.000
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44%	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	11,44%	3.360.978.000	Kota Semarang	APBD		10,04%	2.797.002.000
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan	4%	Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan	4%	260.978.000	Kota Semarang	APBD		4%	87.002.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	terhadap perempuan		terhadap perempuan							
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	150.000.000	Kota Semarang	APBD		12 Dokumen	10.000.000
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Perangkat Daerah	110.978.000	Kota Semarang	APBD		60 Perangkat Daerah	77.002.000
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan	Jumlah lembaga layanan	5 Lembaga	Jumlah lembaga layanan	5 Lembaga		Kota Semarang	APBD		5 Lembaga	2.410.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan		2.200.000.000					
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 Orang	2.100.000.000	Kota Semarang	APBD		100 Orang	2.400.000.000
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan	26 Lembaga	900.000.000	Kota Semarang	APBD		26 Lembaga	300.000.000
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampinga	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana	2 Dokumen	250.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	50.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	n Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297 Orang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	297 Orang	250.000.000	Kota Semarang	APBD		297 Orang	50.000.000
2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	200.000.000	Kota Semarang	APBD		5 Orang	100.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Kewenangan Kabupaten/Kota	ota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik		Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik							
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Dokumen	200.000.000	Kota Semarang	APBD		19 Dokumen	100.000.000
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	2.230.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	3.390.000.000
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga	2 Kegiatan	30.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Kegiatan	590.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	10.000.000	Kota Semarang	APBD		4 Perangkat Daerah	130.000.000
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen	10.000.000	Kota Semarang	APBD		30 Dokumen	130.000.000
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan	1 Dokumen	10.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	330.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	17 Kegiatan	2.050.000.000	Kota Semarang	APBD		18 Kegiatan	2.600.000.000
2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	1.000.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Lembaga	1.250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	800.000.000	Kota Semarang	APBD		16 Orang	1.050.000.000
2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	300.000.000
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG	Persentase Kegiatan pemberdayaa	100%	Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	150.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	200.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	n berbasis gender									
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Layanan	150.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Layanan	200.000.000
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	265.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	400.000.000
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 Kegiatan	265.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Kegiatan	400.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	145.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	200.000.000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	120.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	200.000.000
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	495.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	881.000.000
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	9 Jejaring	250.000.000	Kota Semarang	APBD		10 Jejaring	431.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Kewenangan Kabupaten/Kota										
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	3 Organisasi	150.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Organisasi	256.000.000
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	175.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Kabupaten/Kota									
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga	245.000.000	Kota Semarang	APBD		9 Lembaga	450.000.000
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000	Kota Semarang	APBD		50 Orang	200.000.000
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	45.000.000	Kota Semarang	APBD		3 Dokumen	75.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		Kabupaten/Kota									
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	100.000.000
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	50.000.000	Kota Semarang	APBD		6 Dokumen	75.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	350.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	700.000.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	177 Kelurahan	350.000.000	Kota Semarang	APBD		177 Kelurahan	700.000.000
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	200.000.000
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	250.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Dokumen	500.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	1.080.000.000	Kota Semarang	APBD		100%	2.400.000.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan	177 Kelurahan	1.080.000.000	Kota Semarang	APBD		177 Kelurahan	2.400.000.000
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	2 Dokumen	300.000.000	Kota Semarang	APBD		2 Dokumen	600.000.000

Kode Rekening	Rancangan RKPD Tahun 2025									Prakiraan Maju Tahun 2026	
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	an Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang	1 Lembaga	130.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Lembaga	250.000.000

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rancangan RKPD Tahun 2025								Prakiraan Maju Tahun 2026	
		Rincian Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Indikator Pemutakhiran)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2		3				4	5	6		
		yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Ditingkatkan Kapasitasnya							
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	200.000.000	Kota Semarang	APBD		1 Laporan	400.000.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	450.000.000	Kota Semarang	APBD		4 Laporan	1.150.000.000

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2024

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi DP3A Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja DP3A pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra DP3A Kota Semarang Tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Nomor B/35/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021-2026; maka dalam penyusunan Renja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sasaran serta indikator sub kegiatan.
3. Penyusunan Renja DP3A Kota Semarang ini juga berpedoman pada RKPD Kota Semarang Tahun 2025, sebagai komitmen untuk melaksanakan

kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Renja DP3A ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DP3A Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang. Begitu pula dalam penyusunan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja untuk setiap triwulannya;
2. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen Renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai DP3A Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Renja DP3A Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/ pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3A Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

